



Gaya Kepemimpinan Politik Mahyeldi Ansharullah sebagai Walikota Padang Periode 2014-2019

Political Leadership Style of Mahyeldi Ansharullah as Mayor of Padang City for the 2014-2019 Period

Oktria Felinda*, Magister Ilmu Politik, Universitas Andalas, Indonesia

Aidinil Zetra, Magister Ilmu Politik, Universitas Andalas, Indonesia

Bakaruddin Rosyidi, Magister Ilmu Politik, Universitas Andalas, Indonesia

ABSTRACT

This analysis of Mahyeldi Ansharullah's political leadership style as Mayor of Padang for the 2014-2019 period, departs from Mahyeldi's political leadership style as Mayor of Padang which displays a different political leadership style from the leadership of the previous Mayor. Mahyeldi had served as Deputy Mayor of the previous government period and during his leadership period, Padang City was considered to have experienced significant changes in urban development and governance as evidenced by various awards or achievements that have been obtained by Padang City. Mahyeldi, as a political leader, certainly has a certain leadership style, and there are also a number of factors that influence his political leadership. This is what is studied through research that has been conducted to find out: 1) How is the form of political leadership style applied by Mahyeldi Ansharullah as Mayor of Padang for the 2014-2019 period; 2) Factors that influence his leadership style. The theory used in this research is the theory of transformational leadership and servant leadership. This research uses descriptive qualitative research methods, selecting informants using purposive sampling and snowball sampling techniques. The result of this research is that the political leadership style applied by Mahyeldi Ansharullah as Mayor of Padang which is analysed by combining the theories of servant leadership and transformational leadership has not been fully able to be applied optimally. In this study, it was found that there are two forms of leadership style used by Mahyeldi Ansharullah; First, Mahyeldi as a regional head tries to carry out his duties and responsibilities to the community and his relationship with employees in the Padang City Government in improving performance for development and improving public services. Secondly, on the other hand in a dilemma Mahyeldi as Mayor which is a political position carried by a political party, he must accommodate political interests and must submit to the orders of his party. And the factors that influence Mahyeldi Ansharullah's political leadership style as Mayor of Padang are divided into two types, namely internal factors that come from his personality and external factors derived from the influence of his political party group.

ARTICLE HISTORY

Received 03/11/2023
Revised 15/11/2023
Accepted 23/11/2023
Published 12/02/2024

KEYWORDS

Mahyeldi Ansharullah; Mayor of Padang City; political leadership style; transformational leadership.

*CORRESPONDENCE AUTHOR

✉ oktriafelinda.11@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.30743/mkd.v8i1.8379>

PENDAHULUAN

Pilkada langsung merupakan wujud penerapan sistem demokrasi di Indonesia untuk memilih calon pemimpin yang sesuai dengan harapan masyarakat masing-masing daerah. Pemilihan kepala daerah secara langsung dimulai pada tahun 2005 menyusul perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan disahkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang kemudian diubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Kewenangan Daerah. Pemilihan kepala daerah secara langsung meningkatkan harapan masyarakat untuk memiliki pemimpin yang ambisius, kompeten, dan berpotensi kreatif untuk mendorong pembangunan dan kemajuan daerah. Harapan masyarakat tentunya menginginkan kepemimpinan yang positif untuk kemajuan daerah. Berbicara tentang kepemimpinan berarti adanya hubungan dan pengaruh antara pemimpin dengan orang yang dipimpin di sebuah daerah.

Kepemimpinan kepala daerah yaitu pemimpin politik merupakan ujung tombak pembangunan daerah, karena tanpa kepemimpinan yang baik maka tujuan yang telah ditetapkan akan sulit tercapai. Kepemimpinan kepala daerah saat ini banyak menimbulkan kekecewaan, namun ada pula pemimpin daerah yang mampu membawa perubahan pembangunan yang positif untuk memajukan daerahnya. Saat ini, beberapa pemimpin daerah dinilai mampu mengembangkan atau membawa daerahnya ke arah yang lebih baik dan tercatat sebagai pemimpin yang berprestasi. Pemimpin daerah yang unggul akan membangkitkan harapan masyarakat terhadap perkembangan dan kemajuan daerahnya. Menurut salah satu media lokal, Mahyeldi Ansharullah merupakan pemimpin yang luar biasa khususnya di Provinsi Sumatera Barat. Gaya kepemimpinan Mahyeldi sebagai Walikota Padang merupakan gaya kepemimpinan yang menarik untuk dibahas, karena kepemimpinan politik Mahyeldi sebagai Walikota selama tahun 2014-2019 menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan Mahyeldi sebagai Walikota Kepemimpinan politiknya berbeda dengan gaya kepemimpinan Walikota sebelumnya. Perbedaan masing-masing gaya kepemimpinan politik sebenarnya bergantung pada karakteristik kepribadian dan perilaku masing-masing pemimpin. Mahyeldi yang pernah menjabat sebagai Wakil Walikota pada pemerintahan sebelumnya dan terpilih menjadi Walikota setelah menggantikan Fauzi Bahar pada Pilkada 2013, dan pada masa kepemimpinannya saat ini, Kota Padang dinilai telah mengalami perubahan yang cukup signifikan dalam perkembangan kota tersebut.

Salah satu capaian yang diraih Pemkot Padang belakangan ini adalah ketika menyampaikan Laporan Hasil Penilaian Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LHE-AKIP) kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dari Wilayah I pada tanggal 25 Januari 2018 adalah penerima penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Perangkat. Reformasi Negara dan Birokrasi (Kemenpan-RB) berhasil mencapai hasil akuntabilitas kinerja pada tahun 2017 dengan predikat "BB" atau kategori sangat baik. Prestasi dan penghargaan yang diraih Kota Padang di bawah kepemimpinan Mahyeldi Ansharullah selama masa jabatannya yang luar biasa menunjukkan keseriusan Walikota terhadap pembangunan Kota Padang dengan memberikan dorongan dan membangkitkan semangat kerja pada bawahannya. pemerintah untuk dapat melaksanakan program-program yang direncanakan untuk Kota Padang.

Kemajuan yang dicapai ini dibuktikan dengan adanya perubahan signifikan dalam perencanaan Kota Padang, namun di luar itu ada juga yang berpendapat bahwa Kemajuan Kota Padang bukan karena pendapat Walikota. Kepemimpinan saja tetapi juga karena peran Wakil Walikota dan kelanjutan program pemerintah sebelumnya yang bertujuan untuk menata Kota Padang dan membawa perubahan yang lebih progresif. Mahyeldi sebagai Walikota Padang dianggap sebagai sosok pemimpin yang islami dan rendah hati serta gaya kepemimpinannya yang merakyat. Seluruh agenda pembangunan yang telah direncanakan pemerintah Kota Padang tidak akan berjalan dengan optimal tanpa adanya dukungan dari masyarakat, misalnya saja dalam melakukan penertiban pedagang kaki lima di sepanjang Pantai Padang yang membujur dari jembatan Siti Nurbaya hingga belakang Pangeran Beach Hotel. setiap adanya kegiatan penataan yang dilakukan pemerintah daerah, cenderung mendapat penolakan dari penduduk setempat, hingga tak jarang terjadi tindakan-tindakan anarkis antara masyarakat dengan aparat keamanan. Namun di Kota Padang, kegiatan penataan dan relokasi yang dilakukan pemerintah terhadap masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi berjalan aman dan lancar (Jefri, 2019). Fenomena ini tentu tidak lepas dari peranan seorang pemimpin dalam memberikan perintah kepada bawahannya untuk melakukan proses eksekusi dengan baik tanpa menimbulkan aksi protes dari masyarakat yang dapat memicu terjadinya konflik, sehingga merugikan pemerintah dan rakyatnya sendiri.

Era otonomi daerah saat ini memberikan hak kepada daerah untuk mengatur sendiri urusan daerahnya, sehingga kedudukan kepala daerah sangat strategis. Hal ini terkait dengan pembahasan kepemimpinan politik seorang pemimpin daerah, Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah yang

mengusung motto *“leadership is service”*, yaitu konsep kepemimpinan yang melayani. Menurut Greenleaf, kepemimpinan pelayan adalah kepemimpinan yang timbul dari perasaan tulus yang datang dari hati dan keinginan untuk melayani, khususnya untuk menjadi yang pertama melayani. Esensi dasar dari kepemimpinan yang melayani adalah melayani orang lain, artinya melayani karyawan, pelanggan, dan masyarakat adalah prioritas utama. Kepemimpinan yang melayani akan membawa perubahan besar dalam kehidupan pribadi dan profesional pekerja dan masyarakat. Pola kepemimpinan yang merakyat dan pendekatan kekeluargaan menjadi ciri khas dari Mahyeldi Ansharullah. Ia tak segan makan makanan di tengah pasar, jajan dari penjaja makanan keliling, ataupun bercukur di tukang pangkas sederhana (“Datuak Marajo Mahyeldi Ansharullah,” 2020).

Banyak yang menilai keberhasilan Mahyeldi menjalankan peran kepemimpinannya di Kota Padang tak lepas dari gaya *blsukan*-nya. Dari fenomena tersebut dapat diasumsikan bahwa Mahyeldi menerapkan konsep kepemimpinan yang melayani. Mahyeldi sebagai seorang pemimpin juga dinilai mampu membimbing bawahannya untuk menyatukan visi dengan memberikan motivasi, sehingga mereka dapat bekerja secara efektif dan kreatif dalam menyelesaikan setiap tugas, tugas dan tanggung jawabnya sebagai aparatur sipil negara.

Upaya memotivasi dan menggali potensi anggota merupakan suatu proses transformasi nilai yang dilakukan oleh seorang pemimpin di kalangan bawahannya agar dapat bekerja maksimal untuk mencapai tujuan yang diusulkan dalam organisasi. Dari penafsiran tersebut, peneliti juga berpendapat bahwa Mahyeldi menerapkan gaya kepemimpinan transformasional. Menurut Burns, kepemimpinan transformasional adalah suatu proses di mana orang-orang terlibat dengan orang lain dan menciptakan hubungan yang meningkatkan motivasi dan moralitas pemimpin dan pengikut, sekaligus berusaha membantu pengikut mencapai potensi terbesar mereka.

Transformasi nilai dan motivasi yang diberikan Mahyeldi kepada bawahannya dilakukan melalui dakwah kepada seluruh pegawai instansi pemerintah di Kota Padang, hal ini disebabkan oleh pengalaman Mahyeldi sebagai seorang dakwah. Selama proses observasi, peneliti menemukan kesamaan gaya kepemimpinan yang digunakan Mahyeldi dengan kedua gaya kepemimpinan menurut konsep kepemimpinan transformasional dan kepemimpinan pelayan. Tujuan utama dari kedua konsep kepemimpinan ini adalah untuk mendorong pertumbuhan anggota organisasi, mengembangkan dan melibatkan seluruh anggota dalam realisasi visi organisasi secara optimal, melalui motivasi, kekuatan dan rangsangan yang diberikan seorang pemimpin kepada bawahannya. Dalam kepemimpinan transformasional, pengikut yang termotivasi akan memberikan hasil yang lebih baik dan motivasi apa pun yang diberikan harus melebihi harapan mereka. Sedangkan ketika menjalankan peran kepemimpinan, pemimpin memberikan dorongan dan perhatian sebagai sarana untuk mempengaruhi kinerja.

Menurut Kartini Kartono, pemimpin adalah individu yang mempunyai keterampilan dan kelebihan, termasuk keterampilan dan kelebihan dalam suatu bidang, serta mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi orang lain agar melakukan kegiatan tertentu untuk mencapai suatu tujuan atau lebih. Pemimpin yang berpengaruh mempunyai kemampuan untuk memobilisasi atau menggerakkan orang-orang untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan menurut Hasibuan, pemimpin adalah seseorang yang menggunakan wewenang dan kemampuan kepemimpinannya untuk memimpin orang lain dan bertanggung jawab atas pekerjaan orang tersebut untuk mencapai tujuan. Pemimpin merupakan sosok yang diyakini mampu berperan sebagai penyeimbang dan mediator untuk mencapai tujuan. Pemimpin sebagai agen perubahan harus mampu berpikir kritis untuk memecahkan permasalahan yang muncul dan menghadapi tantangan saat ini dan masa depan untuk menciptakan keberhasilan kerangka pembangunan daerah.

Sedangkan menurut Gardner, kepemimpinan adalah suatu kegiatan atau sekelompok kegiatan yang diamati oleh pihak lain, berlangsung dalam suatu kelompok, organisasi atau badan, dengan partisipasi pemimpin dan pengikut, bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama yang direncanakan. Dalam melakukan penelitian mengenai kepemimpinan perlu dilakukan perbandingan antara kepemimpinan struktural dengan kepemimpinan yang mengarah pada kepemimpinan politik. Jadi, penting untuk ditekankan kembali dalam penelitian ini bahwa selain memahami pengertian kepemimpinan, Anda juga harus memahami pengertian kepemimpinan politik. Oleh karena itu, konsep kepemimpinan politik berbeda dengan konsep manajemen kepemimpinan pada organisasi swasta dan informal lainnya yang tidak memiliki legitimasi rakyat.

Kepemimpinan politik menurut Andrew Heywood dapat dipahami dalam tiga perspektif yaitu kepemimpinan sebagai pola perilaku, kepemimpinan sebagai kualitas personal, kepemimpinan sebagai nilai politik. Kepemimpinan politik biasanya berlangsung di dalam suprastruktur dan infrastruktur politik atau dalam lembaga pemerintah, Partai Politik dan lembaga masyarakat. Oleh sebab itu, pemimpin politik berbeda dengan kepala instansi pemerintahan, karena pemimpin politik lebih menggunakan kewenangan dalam mempengaruhi bawahannya. Berbeda dengan kepala suatu instansi yang cenderung menggunakan hubungan formal dan interpersonal dalam menggerakkan bawahannya. Pemimpin politik lebih menggunakan hubungan-hubungan informal dan personal dalam menggerakkan pengikutnya untuk mencapai tujuan tertentu (Ramlan, [1990](#)).

Orientasi kepemimpinan dalam lembaga pemerintahan lebih bersifat transparan dan demokratis yang bertujuan untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, hal ini berlangsung dalam jangka waktu yang cukup panjang. Sedangkan orientasi dalam manajemen kepemimpinan organisasi swasta lebih bersifat ekonomis untuk mencari keuntungan dengan melihat kondisi pasar dan selera masyarakat. Pemimpin pada organisasi swasta merancang visi dan strategi berdasarkan perhitungan pragmatis dan ekonomis. Berbeda dengan kepemimpinan politik, visi dan strategi dirancang seorang pemimpin berdasarkan pada tujuan politik itu sendiri (Alfan, [2016](#)). Kepemimpinan politik berhubungan dengan aspek moral dan psikologis yang harus dikembangkan pelaku politik, terutama untuk merasakan kegelisahan sosial, menyusun kebijakan politik dan mengamankan setiap kebijakan politik dengan keberanian dan keteguhan sikap. Kepemimpinan politik merupakan salah satu kebutuhan politik utama yang harus dikembangkan dalam arus besar reformasi demokratis seperti sekarang ini.

Kepemimpinan sebagai pola perilaku terkait sekali dengan kemampuan untuk mempengaruhi orang lain dalam mengupayakan tujuan yang diharapkan. Setiap pemimpin berusaha melakukan kegiatannya dengan menggunakan norma perilaku tertentu yang oleh para ahli disebut dengan gaya kepemimpinan. Gaya Kepemimpinan menurut Thoha adalah norma perilaku yang digunakan seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi orang lain seperti yang ia lihat (Miftah, [2003](#)). Untuk mewujudkan dan melaksanakan peran dan tugasnya sebagai seorang pemimpin, kepala daerah diharuskan memiliki sikap, sifat serta gaya kepemimpinan yang sesuai dengan kondisi lingkungan birokrasi, pengikut serta situasi dan kondisi yang melingkupi lembaga pemerintahan yang dipimpinnya.

Setiap pemimpin pada dasarnya memiliki perilaku atau gaya kepemimpinan yang berbeda dalam memimpin. Gaya kepemimpinan merupakan pola perilaku konsisten yang diterapkan pemimpin melalui orang lain, yaitu pola perilaku yang diperlihatkan pemimpin pada saat mempengaruhi orang lain, seperti yang dipersepsikan orang bukan pendapat pemimpin tentang perilakunya sendiri, tetapi bagaimana persepsi bawahan terhadap perilaku pemimpinnya. Gaya kepemimpinan merupakan perilaku dan strategi, sebagai hasil kombinasi dari falsafah, keterampilan, sifat, sikap yang sering diterapkan seorang pemimpin ketika ia mencoba mempengaruhi kinerja bawahannya (Mulyadi & Rivai, [2012](#)). Gaya kepemimpinan sangat berpengaruh terhadap kinerja,

kualitas pelayanan dan pelaksanaan pelayanan yang akhirnya berdampak kepada nilai pelayanan atau terhadap kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik. Lalu, bagaimana jika melihat fenomena gaya kepemimpinan kepala daerah saat ini? Fenomena yang terjadi pada kepemimpinan kepala daerah pada saat ini, yang diisi oleh orang-orang dengan latar belakang yang berbeda-beda dan memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda-beda pula.

Permasalahan serius saat ini adalah krisis kepemimpinan pemimpin daerah yang hampir terjadi di sebagian besar daerah di Indonesia. Data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menunjukkan pada 2010, ada 206 kepala daerah yang tersangkut kasus hukum. Pada tahun berikutnya, Kementerian Dalam Negeri secara rutin mencatat 40 kepala daerah (2011), 41 kepala daerah (2012), dan 23 kepala daerah (2013). Pantauan ICW, selama 2010 hingga 2015, terdapat 183 kepala daerah yang diduga terlibat kasus korupsi. Bupati diduga korupsi 110 orang, Wali Kota 34 orang, Wakil Bupati 16 orang, Gubernur 14 orang, Wakil Wali Kota 7 orang, dan Wakil Wali Kota 7 orang, maksimal 2 orang (<http://www.antikoburu.org.id>, diakses 14 Maret 2017). Lebih lanjut, Kementerian Dalam Negeri mencatat 77 kepala daerah terdampak Operasi Tangkap Tangan (OTT) dan lebih dari 300 kepala daerah terdampak permasalahan tersebut.

Menurut Burns, krisis kepemimpinan ditandai dengan munculnya perilaku buruk atau tidak bertanggung jawab dari sejumlah besar orang yang berkuasa, namun kepemimpinan jarang hadir untuk meresponsnya. Buruknya perilaku seorang pemimpin politik pada umumnya disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap konsep kepemimpinan yang harus dijalankan sebagai pemimpin daerah, serta kaburnya visi pembangunan daerah. Sementara itu, sikap tidak bertanggung jawab sering kali disebabkan oleh seorang pemimpin yang tidak peduli terhadap rakyatnya dan lebih mengutamakan kepentingan golongan atau golongan dibandingkan kepentingan pengikutnya. Dampaknya adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri dan kelompok masyarakat. Hal inilah yang menjadi penyebab semakin maraknya korupsi pada birokrasi di Indonesia saat ini. Fenomena ini mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah atau pemimpinnya sendiri yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini menggabungkan dua teori yang berbeda, yaitu kepemimpinan transformasional dan kepemimpinan pelayan, karena menurut peneliti kedua teori ini memiliki hubungan dan proses yang hampir sama untuk mencapai visi organisasi. Kepemimpinan transformasional pada hakikatnya dapat diamati melalui perilaku yang mendapat kekaguman dari pemimpin dan menunjukkan kepercayaan serta ketertarikan terhadap bawahan, sehingga membentuk ikatan emosional dengan bawahan. Hal ini sesuai dengan gaya kepemimpinan pelayan yang merepresentasikan sikap pemimpin sebagai teladan bagi bawahannya dalam menjalankan seluruh program kerja dan kebijakan yang akan dilaksanakan dalam lingkungan birokrasi. Penelitian ini menampilkan gaya kepemimpinan yang ideal dan dapat dicontoh oleh calon kepala daerah lainnya, yang bisa membawa kemajuan bagi sebuah daerah. Dengan menggabungkan kedua teori tersebut maka akan muncul suatu konsep gaya kepemimpinan yang ideal, yaitu gaya kepemimpinan transformasional dan gaya kepemimpinan melayani, yang diharapkan menjadi satu konsep kepemimpinan yang dapat dianut oleh para pemimpin daerah di Indonesia, khususnya di Kota Padang, Sumatera Barat. Penerapan gaya kepemimpinan yang tepat dalam menjalankan pemerintahan di suatu daerah akan membawa perubahan dan kemajuan bagi daerah tersebut, menjadi teladan bagi pemimpin atau pejabat di daerah lain.

METODE

Dalam penelitian tentang Analisis Gaya Kepemimpinan Politik Mahyeldi Ansharullah Sebagai Walikota Padang Periode 2014-2019 ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif, karena pendekatan ini ditujukan untuk mempelajari fenomena sosial dalam menjelaskan dan menganalisis perilaku manusia dan kelompok, dari sudut pandang yang sama sebagai objek yang

diteliti untuk melihat dan menjelaskan masalah tersebut (Moleong, 2004). Peneliti mengumpulkan data berdasarkan kebutuhan penelitian melihat gaya kepemimpinan Mahyeldi, Menurut Lexy J. Moleong penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari perilaku orang yang diamati. Penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami tentang apa yang dialami terhadap subjek penelitian (Moleong, 2004). Penelitian kualitatif cenderung menggunakan analisis terhadap masalah. Menurut McMillan & Schumacher penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan yang juga disebut pendekatan investigasi, karena peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, peneliti memfokuskan kepada penggalian informasi terkait mengenai bentuk gaya kepemimpinan politik yang dijalankan oleh Mahyeldi Ansharullah sebagai Walikota Padang yaitu melakukan proses tanya jawab dengan beberapa informan yang telah ditentukan.

Penelitian ini menggunakan tipe deskriptif, karena peneliti ingin mendeskripsikan secara sistematis mengenai fakta-fakta yang ditemukan dalam menyelidiki fenomena yang akan diamati. Penelitian deskriptif menurut Whitey adalah penelitian yang berusaha mencari fakta dengan melakukan interpretasi secara tepat untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Deddy, 2001). Tipe penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan sifat suatu keadaan artinya mendeskripsikan segala sesuatu yang memiliki hubungan dengan Gaya Kepemimpinan Politik Mahyeldi Ansharullah. Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan berupa kata-kata tertulis, atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Sejalan dengan tujuan penelitian, karena ingin menjelaskan secara komprehensif tentang bagaimana bentuk Gaya Kepemimpinan Politik Mahyeldi Ansharullah sebagai Walikota Padang periode 2014-2019 dan faktor-faktor Penelitian ini dilakukan di Kota Padang, karena Mahyeldi Ansharullah sebagai objek penelitian merupakan Walikota Padang terpilih pada Pilkada tahun 2013, Mahyeldi yang pernah menjabat sebagai Wakil Walikota periode pemerintahan sebelumnya dan terpilih menjadi Walikota setelah menggantikan Fauzi Bahar pada Pilkada tahun 2013 dan dalam masa periode kepemimpinannya saat ini Kota Padang dinilai telah mengalami perubahan yang cukup signifikan dalam pembangunan tata kota serta tata kelola pemerintahan. Sebagai Walikota Padang untuk periode 2014-2019, Mahyeldi dalam memimpin Kota Padang mengusung motto “Memimpin adalah Melayani” merupakan salah satu pemimpin yang cukup fenomenal.

Dalam suatu penelitian, unit analisis berguna untuk memfokuskan kajian dalam penelitian yang akan dilakukan. Objek yang akan diteliti ditentukan sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Menurut Robert K. Yin unit analisis dibedakan dalam dua bagian yaitu individu meliputi orang-orang dan non individu meliputi organisasi atau lembaga. Unit analisis sebagai pedoman definisi dikaitkan dengan cara penentuan pertanyaan-pertanyaan awal penelitian. Berdasarkan penjelasan di atas, maka yang menjadi unit analisis pada penelitian ini adalah individu (*key informan*), sedangkan yang menjadi unit analisis non individu adalah bawahan (kepala dinas) dan orang-orang yang memiliki kedekatan dengan Mahyeldi Ansharullah sebagai objek penelitian. Peneliti melakukan wawancara mendalam dengan informan kunci, bawahan (kepala dinas) dan orang-orang yang memiliki kedekatan dengan Mahyeldi Ansharullah yang bisa melihat apa yang dilakukan oleh Mahyeldi selama kepemimpinan. Setelah data didapatkan, maka peneliti Penelitian ini menggunakan analisis Miles dan Huberman (1992) dalam buku mereka yang berjudul Analisis data kualitatif. Dalam buku tersebut mereka menegaskan bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara siklus, dimulai dari tahap satu sampai tiga. Kemudian kembali ke tahap satu. Secara garis besar, Miles dan Huberman membagi analisis penelitian kualitatif dalam tiga tahap. Yaitu kodifikasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Tahap kodifikasi data merupakan tahap pengkodean data. Merupakan pemberian penamaan terhadap temuan terhadap hasil penelitian (Afrizal, 2017, p. 178).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gaya Kepemimpinan Melayani Mahyeldi Ansharullah Walikota Padang Periode 2014-2019

Kepemimpinan lahir dari sebuah proses interaksi antara pemimpin dengan orang yang dipimpin. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang (pemimpin atau *leader*) untuk mempengaruhi orang lain (orang yang dipimpin atau pengikut) sehingga orang yang dipimpin bertingkah laku sesuai dengan yang dikehendaki oleh pemimpinnya tersebut (Soekanto, 2006). Kepemimpinan merupakan suatu hubungan antara pihak yang memiliki pengaruh dan orang yang mempengaruhi, dan juga merupakan kemampuan menggunakan sumber pengaruh secara efektif (Ramlan, 1997). Dalam hubungannya dengan penelitian ini, sumber pengaruh yang dimiliki Mahyeldi Ansharullah adalah jabatan Walikota Padang yang diperoleh secara berdaulat melalui Pilkada langsung. Mahyeldi Ansharullah menjadi Walikota Padang periode 2014-2019 menggantikan Fauzi Bahar setelah sebelumnya menjabat sebagai Wakil Walikota periode 2008-2013 dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat periode 2004-2009.

Tujuan utama dari pendekatan gaya untuk menjelaskan bagaimana pemimpin mengombinasikan dua jenis perilaku tersebut untuk mempengaruhi pengikut dalam upaya mencapai tujuan (Northouse, 2013). Kepemimpinan yang berhasil bergantung kepada penerapan gaya kepemimpinan terhadap situasi tertentu. Sehingga suatu gaya kepemimpinan akan efektif apabila gaya kepemimpinan tersebut digunakan dalam situasi yang tepat (Fread, 2019). Gaya kepemimpinan merupakan pola perilaku konsisten yang diterapkan pemimpin melalui orang lain, yaitu pola perilaku yang diperlihatkan pemimpin pada saat mempengaruhi orang lain seperti yang dipersepsikan orang, bukan pendapat pemimpin tentang perilakunya sendiri, tetapi bagaimana persepsi bawahan terhadap perilaku pemimpinnya. Peneliti dalam hal ini menganalisis bentuk gaya kepemimpinan yang diterapkan Mahyeldi Ansharullah sebagai Walikota Padang periode 2014-2019 dari paradigma teori kepemimpinan melayani dan kepemimpinan transformasional. Meskipun peneliti menggunakan kedua teori ini dalam menganalisis bentuk kepemimpinan Mahyeldi Ansharullah, namun tidak menutup kemungkinan adanya bentuk gaya kepemimpinan lain yang diterapkan Mahyeldi sebagai Walikota Padang.

Kepemimpinan yang dijalankan Mahyeldi selama menjabat sebagai Walikota Padang mengusung moto “Memimpin adalah Melayani”. Kepemimpinan yang melayani artinya melayani segala kebutuhan masyarakat dari berbagai sisi, tak hanya dari segi fisik, namun juga non fisik dan sosial. Greenleaf sebagai pelopor konsep kepemimpinan melayani menyatakan bahwa kepemimpinan melayani (*servant leadership*) adalah suatu kepemimpinan yang berawal dari perasaan tulus yang timbul dari dalam hati dan berkehendak untuk melayani yaitu untuk menjadi pihak pertama yang melayani. Pemimpin yang melayani memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa membedakan siapa yang dilayani. Melayani berarti memberikan sesuatu jasa secara ikhlas kepada orang lain (publik) atau pelayanan berdasarkan hati nurani. Maka dari itu dalam menjalankan tugas tersebut dibutuhkan konsistensi diri untuk mempersembahkan kenyamanan dan pemenuhan kebutuhan tidak hanya bagi publik, tetapi juga bagi anggota organisasi. Kepemimpinan berbasis pelayanan pada hakikatnya adalah sikap kepemimpinan yang selalu berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Orientasi kepemimpinan melayani adalah mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dan bawahan dari segala sektor dengan memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada untuk memenuhi kebutuhan pengikutnya. Sumber daya terpenting bagi organisasi adalah sumber daya manusia yaitu orang-orang yang memberikan tenaga, bakat dan kreativitas pada organisasi, baik organisasi swasta maupun organisasi pemerintah (Darmawan, 2015).

Berdasarkan penelitian terdahulu menemukan bahwa Gaya Kepemimpinan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah

(Frengky, [2016](#)). Gaya Kepemimpinan merupakan norma perilaku yang digunakan oleh seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain. Atau dapat pula dikatakan bahwa gaya kepemimpinan adalah pola perilaku yang konsisten ditunjukkan dan sebagai yang diketahui oleh pihak lain ketika seseorang berusaha mempengaruhi kegiatan-kegiatan orang lain (Wahyudi & Suryono, [2006](#)).

Gaya kepemimpinan yang akan mendapatkan perhatian besar dari pegawai. Kepemimpinan yang melayani adalah pendekatan yang berfokus pada kepemimpinan dari sudut pandang pemimpin dengan perilakunya. Terdapat tujuh indikator yang digunakan dalam mengidentifikasi perilaku kepemimpinan yang melayani yaitu: membentuk konsep, memulihkan emosi, mengutamakan pengikut, membantu pengikut untuk tumbuh dan sukses, berperilaku secara etis, memberdayakan dan menciptakan nilai untuk masyarakat. Dari ketujuh indikator tersebut, maka dapat diketahui bagaimana Mahyeldi mengaplikasikan konsep kepemimpinan melayani dalam menjalankan roda pemerintahan sebagai Walikota Padang periode 2014-2019 yang dijabarkan dalam penjelasan berikut.

Membentuk Konsep

Pembentukan konsep merujuk pada pemahaman penuh pemimpin yang melayani tentang organisasi, baik tentang kegunaan, kompleksitas dan misi. Kapasitas ini memungkinkan pemimpin yang melayani untuk berpikir lewat masalah yang rumit, untuk mengetahui bila sesuatu terjadi secara keliru, dan untuk membicarakan masalah secara kreatif dengan tujuan organisasi secara keseluruhan. Kepala daerah mempunyai kapasitas sebagai pejabat politik dan pemimpin pemerintahan di daerahnya. Pemimpin daerah bukanlah sebagai penguasa, tetapi pelayan bagi masyarakat. Kepala daerah harus menjadi pemimpin masyarakat, bukan hanya sebagai perangkat birokrasi. Oleh sebab itu kepala daerah harus memahami dan memiliki konsep kepemimpinan yang jelas dalam menjalankan roda pemerintahan agar kepemimpinan yang dijalankannya lebih terarah dan sukses mencapai tujuan yang telah direncanakan. Konsep kepemimpinan akan menuntun kepala daerah dalam mengarahkan roda pemerintahan yang dijalankannya selama menjadi kepala daerah, sebagaimana yang disampaikan Mahyeldi Ansharullah Datuak Marajo dalam pernyataan berikut (Mahyeldi Ansharullah, [2018](#)):

Bagi saya memimpin itu bukan hanya memerintah saja, memimpin itu ada berapa makna yang pertama Memerintah, Mengayomi yaitu kita memberikan tugas dan kita berikan dukungan fasilitas. Mengarahkan ke mana dan bagaimana melibatkan dan menyinergikan potensi yang ada, dengan regulasi yang baik kemudian dilakukan evaluasi. Fungsi manajemen kepemimpinan itu kan ada *planning* yaitu perencanaan, *organizing* yaitu pengorganisasian, *actuating* yaitu pengarahan dan *controlling* yaitu pengendalian.

Menjadi pemimpin tak hanya sekedar menjalankan roda pemerintahan secara administratif, namun butuh *skill*, wawasan dan pengalaman yang dikombinasikan dengan sikap dan perilaku seorang pemimpin agar kepemimpinannya berjalan efektif. Efektivitas kepemimpinan tidak dapat dipahami tanpa menguji bagaimana pemimpin dan pengikut saling mempengaruhi setiap waktu (Alfan, [2016](#)). Perilaku mempengaruhi seorang pemimpin berasal dari kewenangan untuk memberikan perintah kepada bawahan. Memberikan perintah merupakan bagian dari perilaku yang berarti memberikan perintah dengan kuasa atau kewenangan untuk bertindak mengurus atau melakukan sesuatu sesuai dengan perintah yang diberikan oleh pemimpin kepada bawahannya. Memerintah (*commanding*) dapat dilakukan dengan memberikan arahan kepada pegawai agar mampu menunaikan tugas mereka masing-masing. Selain itu *commanding* dilakukan agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai pada tujuan yang telah ditetapkan (Fayol, [2016](#)). Sedangkan mengayomi berarti melindungi, dalam artian melindungi seluruh pengikut yang menjalankan tugas atas perintah yang diberikan oleh pemimpinnya. Kedua perilaku ini diterapkan Mahyeldi dalam menjalankan konsep kepemimpinannya sebagai Walikota Padang periode 2014-2019.

Memulihkan Emosi

Pemimpin yang melayani menampilkan pemulihan emosi membuat diri mereka tersedia bagi orang lain, membantu mereka dan memberi mereka dukungan dalam menyelesaikan masalah. Upaya ini dilakukan untuk menjaga stabilitas dan konstantinitas diri seorang pemimpin dalam mengontrol dan menjaga kekuatan permanen yang dimilikinya terhadap pengikut yang menjadi bawahannya. Menjaga stabilitas kepemimpinan merupakan faktor penting agar tetap memperoleh dukungan dari orang yang dipimpin. Aplikasi pemulihan emosi Mahyeldi sebagai pemimpin dilakukan dengan cara memahami masalah kerakyatan dan memecahkan masalah tersebut dengan berdiskusi, berdialog untuk mencari solusi atas persoalan yang terjadi baik dalam kegiatan formal maupun non formal, sebagaimana yang disampaikan Habibul Fuadi dalam pernyataan berikut:

“Beliau selalu mendengarkan apa usulan, menyerap informasi langsung dari masyarakat, selalu melakukan musyawarah dan mufakat. Itu yang beliau kedepankan.”

Hal penting yang perlu dilakukan oleh pemimpin melayani yaitu mengendalikan ego dan selalu ingat bahwa peran pemimpin bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Contoh perilaku melayani yang dapat dilakukan oleh pemimpin melayani kepada orang lain adalah menjadi pendengar dan pemecah masalah bagi pengikut. Agar hal itu dapat terwujud, maka tingkat emosional pemimpin yang melayani perlu dijaga agar tetap stabil, hal itu dapat dilakukan melalui pengendalian emosi. Setiap pemimpin yang melayani perlu memiliki kemampuan stabilitas pengendalian emosi dalam berbagai situasi. Stabilitas emosi seorang pemimpin harus diimbangi dengan konsistensinya dalam bersikap dan bertindak laku. Pemulihan emosi dapat membantu orang-orang yang dipimpin untuk mengetahui arah dan tujuan institusi yang dipimpinnya. Semakin baik pemimpin mengelola dan mengarahkan perasaan-perasaan emosi bawahan, akan menunjukkan kecerdasan pemimpin dalam membantu kelompok mencapai tujuan organisasi. Di bawah bimbingan pemimpin yang cerdas secara emosi, anggota organisasi akan merasakan tingkat kenyamanan yang saling menguntungkan. Mereka saling membagi ide, saling belajar satu sama lain, membuat keputusan bersama dan menyelesaikan tugas bersama. Mereka juga membentuk ikatan emosi yang membantu mereka untuk tetap terfokus, bahkan di tengah-tengah perubahan besar dan ketidakpastian.

Upaya pengendalian emosi dilakukan Mahyeldi dengan mendengarkan dan menyerap setiap usulan yang disampaikan pengikut, serta menindaklanjutinya dengan cara bermusyawarah melalui pertemuan dengan masyarakat dan anggota. Mahyeldi sebagai pemimpin senantiasa meluangkan waktu untuk berdiskusi dan mencari solusi atas persoalan yang terjadi dalam lingkungan sosial masyarakat dan juga internal birokrasi. Hasil diskusi yang telah dilakukan, kemudian dirangkum sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan sebuah keputusan. Inilah nilai inti dari indikator kepemimpinan melayani pada pemulihan emosi dan pengendalian diri yang dilakukan Mahyeldi yang mengusung konsep memimpin adalah melayani.

Pemimpin melayani adalah pemimpin yang bersahaja, ketulusan, kejujuran penting dilakukan terhadap diri sendiri. Kesahajaan berarti memandang segala hal sesederhana mungkin, tanpa sedikit pun adanya indikasi penekanan emosi yang tinggi kepada orang lain. Kesahajaan sebagai pemimpin juga bisa ditumbuhkan jika orang mau memandang perannya sekadar untuk melayani orang lain. Pemimpin yang bersahaja dapat dengan mudah merekatkan hubungannya dengan masyarakat dan seluruh pengikut-pengikutnya. Mahyeldi sebagai pemimpin dikenal dekat dengan masyarakat. Kedekatannya membuka pintu yang luas bagi kedua belah pihak dalam menerima dan menginformasikan segala hal yang terkait dengan kondisi dan perencanaan pembangunan Kota Padang, sebagaimana yang disampaikan Mahyeldi dalam pernyataan berikut:

“Dengan menjadi pemimpin yang dekat dengan masyarakat, sehingga masyarakat sangat mudah menginformasikan apa yang menjadi masalah bahkan masalah yang kecil pun bisa diinformasikan kepada kita.”

Esensi dasar dari konsep kepemimpinan adalah pelayanan bagi masyarakat. Oleh sebab itu, setiap pemimpin harus mampu memberikan pelayanan prima bagi masyarakat, tanpa memandang siapa dan kelompok mana yang akan dilayani. Konsep kepemimpinan melayani mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan kepentingan golongannya. Pemimpin yang melayani harus mampu bersinergi dalam menyelaraskan seluruh tujuan masyarakat menjadi tujuan bersama. Jika pemimpin bisa bersinergi dengan baik dengan seluruh unsur yang ada, maka seluruh program kegiatan yang akan direalisasikan dapat dipahami dengan mudah oleh pengikut-pengikutnya.

Kepemimpinan sebagai pola perilaku terkait dengan kemampuan untuk mempengaruhi orang lain dalam mengupayakan tujuan yang diharapkan. Setiap pemimpin berusaha melakukan kegiatannya dengan menggunakan norma perilaku tertentu yang oleh para ahli disebut dengan gaya kepemimpinan. Stoner dalam Pasolong mengatakan bahwa gaya kepemimpinan (*leadership style*) adalah berbagai pola tingkah laku yang disukai oleh pemimpin dalam proses mengarahkan dan mempengaruhi pekerja (Pasolong, 2010). Gaya kepemimpinan menunjuk pada perilaku yang ditampilkan oleh seorang pemimpin di hadapan orang-orang yang dipimpin. Perilaku tersebut berkaitan dengan cara berkomunikasi, pengambilan keputusan dan perilaku penggunaan kekuasaan atau perilaku dalam mempengaruhi orang lain (Aidinil, 2019). Gaya kepemimpinan identik dengan hal bagaimana pemimpin menjalankan tugas kepemimpinannya. Pendekatan gaya berfokus pada apa yang dilakukan pemimpin dan bagaimana mereka bertindak. Pendekatan gaya menyatakan kepemimpinan dibentuk dari dua jenis perilaku umum yaitu perilaku tugas dan perilaku hubungan. Perilaku tugas membantu pencapaian tujuan, sedangkan perilaku hubungan membantu pengikut merasa nyaman dengan diri mereka sendiri, dengan orang lain, dan dengan situasi di mana mereka berada.

Membantu Pengikut Tumbuh dan Sukses

Perilaku ini merujuk pada pengetahuan akan tujuan pribadi dan profesional pengikut, serta membantu mereka untuk mencapai tujuan itu. Pemimpin yang melayani membuat perkembangan karier pengikut sebagai prioritas, termasuk mendampingi pengikut dan memberi bantuan. Pada intinya membantu pengikut untuk tumbuh dan sukses adalah tentang membantu individu ini untuk menjadi orang yang memiliki aktualisasi diri, mencapai potensi penuh mereka. Pemimpin wajib percaya terhadap kemampuan para bawahannya dalam mengatasi masalah, namun jika bawahan tak mampu mencarikan solusi pemimpin wajib turun tangan mengajak bawahannya untuk sama-sama memikirkan solusi dari masalah tersebut, melalui rapat internal birokrasi yang dipimpin langsung oleh kepala daerah, sebagaimana yang disampaikan oleh Habibul Fuadi dalam pernyataan berikut:

“Kalau ada masalah beliau selalu melakukan rapat, lalu menyampaikan masalah yang dihadapi untuk memberikan solusi dalam penyelesaian masalah tersebut. Kalau masyarakat tidak tertib dicari jalan keluarnya agar tertib, seperti menata pantai padang dibangun dulu lapau panjang tempat mereka berjualan.”

Proses penyelesaian masalah tetap mengutamakan peran masing-masing bidang yang ada dalam struktur pemerintahan sesuai dengan Tupoksi masing-masing. Koordinasi antara pemimpin dengan bawahan sangat penting dilakukan untuk mencari solusi dalam mengatasi masalah-masalah tersebut. Koordinasi dalam pelaksanaan suatu rencana merupakan salah satu aspek pengendalian yang dilakukan oleh kepala daerah untuk mengakomodir segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan program kerja pembangunan, maka dari itu kolaborasi antara pemimpin dengan bawahan sangat urgen dalam memecahkan suatu persoalan, agar melahirkan sebuah solusi terbaik untuk masyarakat, inilah yang dilakukan Mahyeldi dalam birokrasi pemerintah Kota Padang sesuai dengan yang disampaikan oleh David Fernandez dalam pernyataan berikut :

Kita di pemerintahan tentunya mempunyai bidang-bidang yang spesifik yang dibawah oleh Walikota di mana jika ada timbul permasalahan otomatis pola koordinasi dan kolaborasi sangat dibutuhkan, ada masyarakat dan birokrat lain yang membantu.

Pola koordinasi pemimpin dengan bawahan dalam mencari solusi dan menyatukan persepsi untuk mengatasi sebuah masalah harus melibatkan seluruh unsur. Tak hanya bersama pegawai dengan masyarakat pun wajib dilakukan, karena hakikat kepemimpinan yang dijalankan Mahyeldi sebagai kepala daerah adalah memimpin seluruh orang-orang atau warga masyarakat sipil dan aparatur negara di Kota Padang. Oleh sebab itu, Mahyeldi harus mampu menciptakan komunikasi positif untuk membangun sebuah kepercayaan dengan seluruh unsur-unsur yang ada bahwa yang dilakukan pemerintah itu bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok melainkan untuk kepentingan masyarakat secara kolektif, seperti yang disampaikan Chorriy Saidan dalam pernyataan berikut:

Meyakinkan orang bahwa yang kita lakukan ini bukanlah untuk kepentingan kelompok tertentu atau ego sektoral saja tetapi adalah memang berdasarkan kepada aturan-aturan yang telah ditetapkan dan pertimbangan-pertimbangan yang sudah sedemikian rupa, tidak hanya komunikasi, sosialisasi, edukasi juga itu yang beliau lakukan sebagai seorang pemimpin.

Pemimpin yang komunikatif adalah pemimpin yang bisa menyatukan persepsi seluruh unsur yang ada. Pemimpin komunikatif akan berupaya menjalin komunikasi yang baik dengan bawahannya. Tersalurnya komunikasi yang lancar akan menciptakan sebuah kerja sama tim yang solid untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Komunikasi menjadi fungsi koordinasi bagi pemimpin dengan bawahan untuk menyampaikan hal-hal pokok terkait dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan kinerja dan program kerja pemerintahan. Membangun komunikasi yang baik lebih utama dilakukan pada pertemuan tatap muka, seperti musyawarah, rapat dan diskusi untuk menyampaikan hal-hal penting baik kepada masyarakat maupun kepada pegawai yang ada dalam birokrasi Pemerintahan Kota Padang, seperti yang telah dilakukan Mahyeldi dalam pernyataan yang disampaikan oleh Heriyanto Rustam berikut:

“Beliau lakukan pendekatan dan musyawarah dengan masyarakat untuk menyampaikan aturan dan ketentuan Undang-Undang yang berlaku, dengan harapan masyarakat bisa memahami seluruh agenda dan program yang akan dilaksanakan.”

Pemimpin adalah orang yang paling bertanggung jawab atas kinerja sebuah birokrasi. Pemimpin merupakan tokoh penting dalam suatu organisasi, bisa dikatakan bahwa kemajuan organisasi dapat dipengaruhi oleh kemampuan seorang pemimpin dalam mengelola organisasinya. Wewenang delegasi yang diberikan kepada pengikut untuk menyelesaikan masalah dengan cara mereka sendiri pada masing-masing bidang merupakan upaya yang dilakukan Mahyeldi untuk membantu pertumbuhan pengikut agar tumbuh dan sukses dalam mencapai karier yang lebih baik. Mahyeldi sebagai pemimpin melakukan hal itu kepada mereka, namun jika bawahan tak mampu mencari solusi Mahyeldi langsung turun tangan mengajak bawahannya untuk sama-sama memikirkan solusi dari masalah tersebut, melalui rapat internal birokrasi. Gaya pemimpin yang positif punya pengaruh kepada pengikutnya, mereka akan berperilaku dan menunjukkan kinerja berdasarkan gaya yang dilakukan.

Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi kelompok menuju pencapaian sasaran (Robbins, 2006). Gaya kepemimpinan berpengaruh kepada kinerja pegawai atau bawahan yang dipimpin. Penelitian terdahulu menunjukkan terdapat pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan namun tidak signifikan. Artinya, gaya kepemimpinan yang diterapkan di Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara belum sesuai dengan harapan para karyawan. Hal ini terjadi karena sering terjadi mutasi dan pergantian pimpinan. Setiap pergantian pucuk pimpinan maka otomatis selalu terjadi perubahan kebijakan, sehingga efek dari gaya kepemimpinan belum sempat dirasakan

oleh para karyawan, sudah terjadi lagi mutasi pimpinan. Penerapan gaya kepemimpinan transaksional di Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara belum membuahkan hasil yang maksimal dikarenakan kurangnya pemberian imbalan dalam bentuk finansial kepada karyawan yang berprestasi (Trang, [2013](#)).

Sementara itu melihat kepada penelitian terdahulu bahwa kepemimpinan kepala daerah oleh seorang perempuan juga menjadi sebuah pelajaran yang menarik bahwa gaya kepemimpinan Tri Risma Harini yang sesuai berdasarkan gaya kepemimpinan berdasarkan teori menurut Robert Albanese dan David D Van Fleet (1994) gaya kepemimpinan yang paling dominan dalam pengambilan keputusan. Dan berbagai macam pencapaian selama menjabat menjadi walikota yaitu pembangunan lahan kosong sebagai taman, hingga meraih pencapaian selama menjabat penghargaan piala adipura. Serta tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memotivasi kepada setiap pemimpin di suatu organisasi khususnya pemimpin perempuan yang harus memiliki etos kerja, inovasi serta semangat membangun perubahan. Menghasilkan kesimpulan bahwa gaya kepemimpinan Tri Risma Harini sebagai Kepala Daerah yang demokratis, mempunyai empati pada masyarakatnya dengan gaya kepemimpinan transformasional, demokratis, kharismatik, kepribadian inovatif, kepribadian yang memotivasi; dan memiliki sejumlah reputasi. Penelitian terdahulu lainnya juga dapat disorot Gaya kepemimpinan Anies Baswedan menggunakan pendekatan personal pemimpin dan pendekatan karakteristik kepemimpinan yang akan menghasilkan kepemimpinan resonansi yang berfungsi menguatkan dan memperpanjang dampak emosi kepemimpinan. Memahami visi, misi dan tujuan yang diharapkan Anies selaku kepala daerah kepada semua pihak terkait dengan kepemimpinannya di DKI Jakarta baik kepada pemerintah. Kepemimpinan transformasional terjadinya kesamaan persepsi antara pimpinan dan bawahan dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai organisasi melalui kepercayaan, kebanggaan, komitmen, rasa hormat, serta loyalitas dari bawahan ke atasan dalam meningkatkan kinerja (Sinaga, Effendi, Habibie, & Adawiyah, [2023](#)).

Berperilaku Secara Etis

Berperilaku secara etis berarti melakukan hal yang benar dengan cara yang benar. Perilaku ini memegang standar etis yang kuat, termasuk bersikap terbuka, jujur dan adil. Kepemimpinan Mahyeldi dinilai jujur oleh bawahannya, baik secara lisan maupun tindakan. Pemimpin yang jujur adalah pemimpin yang menampilkan ketulusan dan integritas dalam semua tindakannya. Dalam hal ini perilaku manipulatif tidak akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pemimpinnya. Mahyeldi selalu tampil apa adanya dan selalu menghargai bawahannya, baik ketika berada di luar maupun di dalam lingkungan instansi pemerintah Kota Padang, seperti yang disampaikan oleh Heriyanto Rustam Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Keluarga Berencana, dalam pernyataan berikut (Rustam, [2018](#)):

Beliau adalah sosok pemimpin yang jujur baik lisan maupun perbuatan, pemimpin yang amanah dan tidak banyak kehendak kepada bawahannya.

Ada sejumlah bukti bahwa kepemimpinan efektif adalah ditandai dengan sifat-sifat jujur, integritas, dan percaya diri. Ada bukti yang kurang konklusif yang terkait dengan peran sifat kreatif, fleksibilitas, dan karisma. Studi menunjukkan bahwa tanpa jujur dan integritas, organisasi yang dipimpin oleh pemimpin akan runtuh perlahan-lahan. Integritas didefinisikan sebagai adanya kesesuaian antara kata dan perbuatan. Jujur menunjukkan manusia yang benar atau tidak suka menipu. Pemimpin yang jujur adalah pemimpin yang memegang nilai-nilai etis kehidupan yang dapat mengangkat derajat dan moralitas mereka dimata pengikut-pengikutnya. Ini akan bernilai manfaat dalam membentuk respons dan menarik rasa simpati masyarakat terhadap dirinya sebagai pemimpin. Apabila seorang pemimpin memiliki derajat dan moralitas yang tinggi dimata masyarakatnya, maka pemimpin tersebut akan lebih dihargai. Oleh sebab itu, Mahyeldi sebagai Walikota menekankan

kepada seluruh pegawai yang ada dalam instansi pemerintah Kota untuk menjunjung nilai-nilai etis kehidupan, agar memperoleh kepercayaan yang tinggi dari masyarakat dalam bekerja, sebagaimana yang disampaikan Amasrul dalam pernyataan berikut:

“Beliau selalu mengingatkan kepada kita agar memiliki moralitas yang tinggi supaya lebih dihargai oleh masyarakat. Beliau selalu mencontohkan hal itu kepada kami. Dari contoh-contoh sikap yang ditunjukkan beliau dan wajib kami ikuti untuk dapat diterapkan kepada masyarakat seperti yang telah beliau lakukan. Di sinilah hubungan emosional beliau terjalin dengan para bawahannya.”

Sumber utama etika birokrasi adalah moralitas aparat birokrasi dalam melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan yang tercermin ke dalam fungsi pokok pemerintahan seperti: fungsi pelayanan, pengaturan, regulasi dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Moralitas birokrat tergambar dalam diri aparatur mengenai pemikiran, pola sikap dan perilaku yang ditampilkan ketika berhubungan dan melayani kepentingan masyarakat. Moralitas terkait dengan nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan hidup bagi seseorang atau sekelompok orang, maka dari itu kepala daerah sebagai pemimpin pemerintahan wajib memberikan pengarahan kepada aparaturnya agar memiliki pola perilaku yang terpuji sesuai dengan kode etik pemerintahan. Hal ini sejalan dengan pernyataan yang disampaikan oleh W salah satu pegawai Pemko Padang yang dimutasi. Upaya membentuk moralitas dan etika pegawai Pemko Padang dilakukan secara kolektif melalui pengarahan yang diberikan Walikota kepada seluruh pegawai tanpa terkecuali, sebagaimana yang dapat dilihat dalam pernyataan berikut:

Kepribadian Mahyeldi menurut saya cukup baik, pengarahan dan nasehat yang diberikan kepada pegawai juga cukup baik. Selama ini saya tidak ada masalah pribadi dengannya. Saya menjadi korban karena tuntutan yang harus dipenuhi untuk mengikuti kehendak orang-orang yang ada di partai politiknya.

Standar moral dan etika birokrat merupakan tolak ukur bagi masyarakat dalam menilai pelayanan yang diberikan oleh aparatur Negara. Mahyeldi sebagai pemimpin berupaya menata dan mengarahkan perilaku pegawai Pemko Padang agar memiliki standar moral dan etika yang baik kepada masyarakat, karena aparatur yang bekerja dalam pemerintahan Kota Padang merupakan pelayan yang bertugas untuk memenuhi segala kebutuhan masyarakat. Hal ini dilakukan kepada seluruh pegawai tanpa terkecuali, termasuk orang-orang yang tereliminasi dari jabatannya sebagai pegawai pemerintahan Kota Padang, akibat kepentingan politik yang memaksa Mahyeldi untuk mengambil sikap demikian, karena tuntutan yang diberikan oleh partai politiknya.

Memberdayakan

Memberdayakan merujuk pada tindakan yang membolehkan pengikut untuk membuat keputusan sendiri dan otonom. Inilah cara pemimpin berbagi kekuasaan dengan pengikut dengan membolehkan mereka memiliki kendali. Pemberdayaan membangun kepercayaan diri pengikut untuk mengatasi situasi dengan cara yang mereka anggap terbaik. Hal ini dilakukan Mahyeldi dengan cara memberikan tugas utama kepada pegawainya untuk mencari benang merah atau akar penyebab terjadinya masalah dan diselesaikan secara bersama-sama pada bidang masing-masing melalui rapat internal jajaran SKPD dalam instansi pemerintahan Kota Padang, sebagaimana yang disampaikan oleh Amasrul dalam pernyataan berikut:

“Dalam mengatasi masalah, beliau selalu ingatkan kepada kita untuk mencari benang merah dari masalah tersebut, regulasi atau dasar hukum yang mengatur. Dalam menyelesaikan masalah beliau selalu mempercayakan kepada kita untuk mencari solusi terbaik terlebih dahulu. Jika ada benturan atau ada kesulitan, barulah kita diminta untuk duduk bersama mendiskusikan dan mencari solusi terbaik dari masalah tersebut.”

Prioritas utama dari kepemimpinan melayani adalah pada bagaimana mengembangkan pihak lain (pengikut, komunitas internal dan eksternal), bukan untuk mementingkan diri sendiri. Konsep

kepemimpinan pelayan lebih menekankan pada pentingnya menghargai manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, sehingga pemimpin menganggap bahwa pemberdayaan dan pengembangan pengikut adalah amanah yang harus dipenuhi kewenangan otonom yang diberikan Mahyeldi kepada bawahannya dalam menyelesaikan masalah masing-masing bidang merupakan wujud kepercayaan dan pemberdayaan pemimpin kepada pengikut. Mahyeldi sebagai pemimpin meminta kepada jajaran Pemko Padang untuk mencarikan benang merah dari masalah tersebut dan diselesaikan terlebih dahulu oleh bidang masing-masing. Namun jika bawahannya tidak menemukan solusi yang solutif, maka Mahyeldi sebagai pemimpin ikut memberikan solusi alternatif dari masalah yang terjadi. Pemimpin wajib percaya terhadap kemampuan para bawahannya dalam mengatasi masalah, namun jika bawahan tak mampu mencarikan solusi pemimpin wajib turun tangan mengajak bawahannya untuk sama-sama memikirkan solusi dari masalah tersebut, sebagaimana yang disampaikan oleh Habibul Fuadi dalam pernyataan berikut:

“Kalau ada masalah beliau selalu melakukan rapat dan berdialog, lalu menyampaikan masalah yang dihadapi dan diskusi untuk memberikan solusi dalam penyelesaian masalah tersebut. Kalau masyarakat tidak tertib dicari jalan keluarnya agar tertib, seperti menata pantai padang itu kan cukup alot juga, dibangun dulu *lapau* panjang tempat mereka berjualan ternyata mereka mau diajak dengan diskusi.”

Proses penyelesaian masalah tetap mengutamakan peran masing-masing bidang yang ada dalam struktur pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi mereka masing-masing. Oleh sebab itu koordinasi antara pemimpin dengan bawahan sangat penting dilakukan untuk mencari jalan keluar dalam mengatasi masalah-masalah tersebut.

SIMPULAN

Dari hasil penelitian yang merupakan keseluruhan hasil dari pengumpulan data dan informasi yang cukup menunjang penelitian tentang analisis gaya kepemimpinan politik Mahyeldi Ansharullah sebagai Walikota Padang ini, di mana kepemimpinan politik merupakan masalah realisasi dan pengaruh antara pemimpin dengan yang dipimpin yang menjadi hasil interaksi antara individu-individu dan pemimpin dalam sistem politik. Bagaimana pemimpin untuk mengajak, mempengaruhi, menggerakkan orang lain guna melakukan pencapaian suatu tujuan. Kepemimpinan politik yang tepat akan membawa perubahan ke arah yang lebih baik, maka dalam penelitian ini diperlukan analisis tentang gaya kepemimpinan politik Walikota Padang di mana gaya kepemimpinan politik Mahyeldi sebagai Walikota Padang periode 2014-2019 dijadikan sebagai objek penelitian. Mahyeldi menampakkan gaya kepemimpinan politiknya yang berbeda dengan kepemimpinan Walikota sebelumnya. Perbedaan masing-masing gaya kepemimpinan politik tersebut sangat tergantung pada kekhasan dari masing-masing kepribadian dan perilaku unik dari masing-masing pemimpin tersebut dan juga dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal.

Dalam penelitian ini menganalisis gaya kepemimpinan politik Mahyeldi dengan menggunakan paradigma kepemimpinan melayani dan kepemimpinan transformasional. Berdasarkan pada ke tujuh indikator kepemimpinan melayani yakni; membentuk konsep, memulihkan emosi, mengutamakan pengikut, membantu pengikut tumbuh dan sukses, berperilaku secara etis, memberdayakan dan menciptakan nilai untuk masyarakat serta indikator kepemimpinan transformasional yang terdiri dari empat indikator yaitu: pengaruh ideal, motivasi yang menginspirasi, rangsangan intelektual dan pertimbangan yang diadaptasi. Maka peneliti menarik kesimpulan, bahwa gaya kepemimpinan politik yang digunakan atau diterapkan oleh Walikota Padang, Mahyeldi Ansharullah dalam kepemimpinannya di Pemerintah Kota Padang yang merupakan kombinasi antara kepemimpinan melayani dan kepemimpinan transformasional belum sepenuhnya mampu diaplikasikannya secara optimal, gabungan gaya kepemimpinan transformasional dan kepemimpinan melayani tersebut beliau gunakan dalam hal mentransformasikan nilai-nilai spiritual untuk memotivasi pegawai Pemerintah Kota Padang agar mampu meningkatkan kinerja dalam pelayanan publik serta pembangunan tata kota dan tata pemerintahan yang baik yang dibuktikan dengan pencapaian

prestasi dan penghargaan yang diraih Kota Padang. Akan tetapi dalam unsur pengambilan keputusan sebenarnya beliau lebih dipengaruhi oleh kuatnya pengaruh dan tekanan yang diberikan oleh orang-orang yang ada dalam partai politiknya, terutama sekali dalam proses pengambilan kebijakan dan penyusunan program kerja yang lebih mempertimbangkan masukan dari orang-orang dalam lingkaran partai politiknya dibanding pengikutnya yang ada dalam lingkungan birokrasi. Karena saran dan masukan itu hanya menjadi pertimbangan bagi beliau, pada akhirnya beliau lebih dominan menggunakan atau mendengarkan keputusan partainya. Oleh sebab itu, konsep kepemimpinan melayani dan transformasional yang dijadikan kerangka acuan dalam menganalisis gaya kepemimpinan politik Mahyeldi Ansharullah sebagai Walikota Padang periode 2014-2019 belum cukup untuk menjelaskan kepemimpinan yang efektif dan ideal sebagai kepala daerah.

Dalam penelitian tentang gaya kepemimpinan politik Mahyeldi Ansharullah sebagai Walikota Padang periode 2014-2019 menyimpulkan bahwa ada dua bentuk gaya kepemimpinan yang digunakan oleh Mahyeldi Ansharullah. Pertama, Mahyeldi sebagai kepala daerah berusaha menjalankan tugas dan tanggung jawabnya kepada publik dengan sebaik-baiknya dan hubungannya dengan jajaran di Pemerintah Kota Padang. Kedua, pada sisi lain dalam keadaan yang dilematik Mahyeldi sebagai Walikota yang merupakan jabatan politis yang diusung oleh partai politik, dia harus mengakomodasi kepentingan politik dan harus tunduk dengan perintah dan keputusan partai politiknya.

REFERENSI

- Afrizal. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Depok: Rajagrafindo Persada.
- Aidinil, Z. (2019). *Gaya Kepemimpinan (Bahan Bacaan Kuliah Kepemimpinan Politik)*. Padang.
- Alfan, M. (2016). *Wawasan Kepemimpinan Politik: Perbincangan Kepemimpinan Di Ranah Kekuasaan*. Bekasi: PT Penjuru Ilmu Sejati.
- Darmawan, L. A. (2015). Pentingnya Motivasi Kerja Pegawai Pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Morowali Utara. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 2(6).
- Datuak Marajo Mahyeldi Ansharullah: Melayani adalah Kewajiban Pemimpin. (2020, February 13). Retrieved February 11, 2024, from Harian Haluan website: <https://www.harianhaluan.com/padang/pr-10222852/datuak-marajo-mahyeldi-ansharullah-melayani-adalah-kewajiban-pemimpin>
- Deddy, M. (2001). *Metode Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi & Ilmu Sosial lainnya*. Bandung. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Fayol. (2016). *Modul Perkuliahan Manajemen Pusat Data: Manajemen Kepemimpinan dan Tim*. Jakarta: Universitas Mercu Buana.
- Fread, F. (2019). *Kepemimpinan Dan Kekuasaan Suatu Tinjauan Perilaku Organisasi*. Semarang.
- Frengky, B. (2016). Analisis Gaya Kepemimpinan, Kepuasan Kerja, Komitmen Organisasi dan Kompetensi terhadap Kinerja Pegawai. *Jurnal Riset Bisnis Dan Manajemen*, 4(3). Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/jrbm/article/view/12743>
- Jefri, H. (2019). *Mahyeldi Model Pemimpin Ideal Indonesia*. Retrieved from <https://www.indonesiana.id/read/76932/login>
- Mahyeldi Ansharullah. (2018). *Wawancara*.
- Miftah, T. (2003). *Kepemimpinan dalam Manajemen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Moleong, L. J. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Mulyadi, D., & Rivai, V. (2012). *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi Edisi Ketiga*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Northouse, P. G. (2013). *Kepemimpinan: Teori dan Praktik*. Jakarta: PT. Indeks.
- Pasolong, H. (2010). *Kepemimpinan Birokrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Ramlan, S. (1990). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo.
- Ramlan, S. (1997). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana.
- Robbins, S. P. (2006). *Teori Organisasi: Struktur Desain dan Aplikasi*. Jakarta: Arcan.
- Rustam, H. (2018). *Wawancara*.
- Sinaga, A. B., Effendi, C., Habibie, M., & Adawiyah, S. E. (2023). Gaya Kepemimpinan Anies Baswedan. *SWATANTRA*, 21(2), 179. <https://doi.org/10.24853/swatantra.21.2.179-188>
- Soekanto, S. (2006). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Trang, D. S. (2013). Gaya Kepemimpinan Dan Budaya Organisasi: Pengaruhnya Terhadap Kinerja Karyawan. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3).
<https://doi.org/10.35794/emba.1.3.2013.1995>
- Wahyudi, A., & Suryono, J. (2006). Analisis Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Motivasi dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai. *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia*, 1(1), 1–14. Retrieved from
<https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Manajemen/article/view/67>